

## KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

# DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



Pertificate

NOMOR 5/0220220424/AS.01.03/IV/2024

## Diberikan Kepada:

This is to certify that :

Nama

name

Tempat, tanggal lahir Place, date of birth

Perusahaan/Instansi

company/institution

: KAMAL ANDREANSYAH

Jakarta, 24 Oktober 1991

Kopegmar Tanjung Priok

## TELAH MENGIKUTI

Has successfully attended

## PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

Diselenggarakan oleh Held by

## PT Mitra Dinamis Yang Utama

Tanggal 12 - 26 Februari 2024 On February 12 - 26, 2024

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai The holder of this certificate qualifies the requirements as

Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Occupational Safety and Health expert candidate

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per.02/Men/1992 concerning the Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert

Jakarta, 22 April 2024

Jakarta, April 22, 2024

a.n. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,

On Behalf of Director General of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health,

Direktur Bina Kelembagaan K3,

Director of Occupational Safety and Health Institutional Development,

Hery Sutanto, S.T., M.M. NIP 19710922 199703 1 002







## **MATERI PEMBINAAN**

## CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3) UMUM

THE CURRICULUM TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) EXPERT

1.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
	Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety

- 2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety and Health National Policy
- 3. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja The Principles of Occupational Safety and Health
- 4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety and Health Committee
- 5. Pengawasan Kesehatan Kerja Occupational Health Inspection
- 6. Pengawasan Lingkungan Kerja Working Environment Inspection
- 7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran Fire Prevention Occupational Safety and Health Inspection
- 8. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik Electric Installation Occupational Safety and Health Inspection
- 9. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan Occupational Safety and Health on Building Construction Inspection
- 10. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik Mechanical Occupational Safety and Health Inspection
- 11. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap Boiler Occupational Safety and Health Inspection
- 12. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan Pressure Vessel Occupational Safety and Health Inspection
- 13. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
  Occupational Safety and Health Management System
- 14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Audit of Occupational Safety and Health Management System
- 15. Manajemen Resiko Risk Management
- 16. Analisa Kecelakaan Accident Analysis
- 17. Laporan Statistik Kecelakaan Report of Accident Statistic
- 18. Praktek Kerja Lapangan On The Job Training
- 19. Seminar
- 20. Evaluasi Evaluation

## KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 / 4382 / AS.01.03 / IV / 2024

**TENTANG** 

## PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap KAMAL ANDREANSYAH, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
  - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli:
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan
- 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan dari PT Mitra Dinamis Yang Utama Nomor 194 / AK3U / LG / II / 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;
  - 2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5 / 08 / AS.01.03 / IV / 2024 tanggal 15 April 2024

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

KESATU

: Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :

Nama

KAMAL ANDREANSYAH

Tempat, Tanggal Lahir

Jakarta, 24 Oktober 1991

Perusahaan

KOPEGMAR TANJUNG PRIOK

Alamat

Jalan Cempaka No.14, Rawa Badak Utara, Koja,

Jakarta Utara

KEDUA

: Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 April 2024.





a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I NEW TUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

> Dr. Haiyani Rumondang, M.A. NIP 19640419 198903 2 001

## **KEWAJIBAN**

## AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

- Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat;
- Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
  - a. Jadwal kegiatan;
  - b. Prosedur pelaksanaan;
  - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
- 3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 setiap 3 (tiga) bulan sekali
- 5. Surat Keputusan Penunjukan dapat perpanjangan dengan ketentuan :
  - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
  - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.